

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI UNIT PENGELOLAAN IKAN (UPI) PT BERKAT MINA BAHARI TATURAN KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Reynaldi Abram Marinu¹, Joyce Jacinta Rares², Joorie Marhaen Ruru³

¹²³ Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2026

Revised Juli 2026

Accepted Juli 2026

Available Juli 2026

reynaldimarinu19@gmail.com

joy.rares09@gmail.com

joorieruru@unsrat.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Unit Pengelolaan Ikan (UPI) PT Berkat Mina Bahari di Desa Taturan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud. Wilayah pesisir memiliki potensi kelautan yang melimpah, namun masyarakat nelayan seringkali terkendala keterbatasan akses modal, teknologi, dan jaringan pasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Kerangka analisis mengacu pada empat dimensi pemberdayaan menurut Jim Iff, yaitu peningkatan kapasitas, akses terhadap sumber daya dan

pasar, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta penguatan kontrol ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan UPI PT Berkat Mina Bahari telah memberikan kontribusi positif dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal, terutama melalui transfer pengetahuan teknis dasar pengolahan ikan (*learning by doing*) serta kepastian jaminan pasar bagi hasil tangkapan nelayan. Namun, proses pemberdayaan belum berjalan secara komprehensif karena peningkatan kapasitas masih terbatas pada ranah teknis operasional, struktur akses pasar memicu ketergantungan monopsonistik, partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat pelaksanaan (*pseudo-participation*), dan kontrol ekonomi masih tersentralisasi pada pihak perusahaan. Kesimpulannya, upaya pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Taturan perlu ditransformasikan dari keterlibatan operasional semata menuju penguatan kapasitas manajerial, diversifikasi pasar, serta kelembagaan ekonomi mandiri.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir, Unit Pengelolaan Ikan

ABSTRACT

*This study aims to analyze and describe the process of coastal community empowerment through the Fish Management Unit (UPI) of PT Berkat Mina Bahari in Taturan Village, Gemeh Sub-district, Talaud Islands Regency. Despite abundant marine resources, coastal fishing communities often face limitations in capital, technology, and market access. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were gathered through in-depth interviews, field observations, and documentation, and analyzed using data condensation, data display, and conclusion drawing. The analytical framework is based on Jim Iff's four dimensions of empowerment: capacity building, access to resources and markets, participation in decision-making, and gaining economic control. The findings indicate that the presence of UPI PT Berkat Mina Bahari has positively contributed to boosting the local economy, particularly through basic technical knowledge transfer in fish processing (*learning by doing*) and providing market assurance for fishermen's catches. However, empowerment has not been fully achieved because*

*Corresponding author

E-mail addresses: reynaldimarinu19@gmail.com



capacity building remains limited to basic technical skills, market access structures create monopsonistic dependency, community participation remains at the operational level (pseudo-participation), and economic control is highly centralized within the company. In conclusion, coastal community empowerment in Taturan Village needs to be transformed from mere operational involvement toward strengthening managerial capabilities, market diversification, and independent economic institutions.

Keywords: Empowerment, Coastal Communities, Fish Management Unit

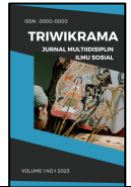
1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. Dengan garis pantai yang sangat panjang dan wilayah perairan yang luas, sektor kelautan dan perikanan memegang peranan yang amat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini tidak hanya berperan penting dalam penyediaan pangan berprotein tinggi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian utama, pencipta lapangan kerja, serta penyumbang devisa negara melalui ekspor komoditas perikanan. Oleh sebab itu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan senantiasa menjadi salah satu agenda prioritas nasional guna menempatkan ekonomi maritim sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun Indonesia dianugerahi potensi sumber daya kelautan yang melimpah, kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam aktivitas perikanan masih diwarnai oleh berbagai keterbatasan dan kerentanan. Dalam realitas pembangunan perikanan nasional, kebijakan dan program yang dijalankan kerap kali lebih berorientasi pada peningkatan volume produksi dan kelancaran distribusi komoditas belaka. Aspek penguatan kapasitas, kemandirian, dan kedaulatan ekonomi masyarakat pesisir belum sepenuhnya ditempatkan sebagai fokus utama. Akibatnya, manfaat nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya perikanan belum terdistribusi secara adil dan merata, terutama bagi kelompok nelayan skala kecil dan buruh tangkap (Satria, 2015). Dalam tata kelola ekonomi perikanan konvensional, nelayan kecil umumnya terjebak pada peran perifer sebagai penyedia bahan baku mentah (*raw material*). Sementara itu, tahapan pengolahan, pengemasan, dan pemasaran yang memegang proporsi nilai tambah ekonomi paling tinggi dikuasai oleh aktor-aktor pemilik modal besar, teknologi modern, serta akses jaringan pasar yang luas.

Selain masalah ketimpangan struktur nilai tambah, masyarakat pesisir juga dihadapkan pada kompleksitas kerentanan sosial dan lingkungan. Tingginya ketergantungan pada kondisi cuaca, fluktuasi musim, ketidakpastian harga jual hasil tangkapan, serta keterbatasan modal usaha menyebabkan tingkat pendapatan nelayan bersifat fluktuatif dan sangat tidak stabil (Satria, 2015). Dalam banyak kasus di kawasan pesisir dan kepulauan, pola relasi ekonomi antara nelayan kecil dengan tengkulak atau pemodal informal menciptakan patronase dan ketergantungan yang berkepanjangan, sehingga memperlemah posisi tawar (*bargaining position*) masyarakat pesisir dalam ekosistem perdagangan perikanan. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan utama di wilayah pesisir bukan sekadar ketersediaan stok ikan di laut, melainkan mencakup hambatan struktural dalam mengases modal, teknologi pengolahan, dan jaringan pasar yang adil.

Dalam kerangka teoritis pembangunan masyarakat, penanganan ketimpangan sosial ekonomi pesisir memerlukan pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) yang komprehensif. Jim Ife (2016) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses sistematis untuk meningkatkan kapasitas individu maupun komunitas agar mereka mampu menentukan pilihan-pilihan hidupnya serta mentransformasikan pilihan tersebut menjadi tindakan nyata yang



berdaya guna. Pemberdayaan tidak boleh direduksi sebatas peningkatan kriteria ekonomi semata, melainkan harus mencakup akumulasi kapasitas personal, perluasan akses terhadap sumber daya, keikutsertaan aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta peningkatan kontrol atau penguasaan masyarakat terhadap proses pembangunan yang memengaruhi ruang hidup mereka (Ife, 2016). Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Robert Chambers (1997) melalui paradigma '*putting the last first*', yang menuntut adanya pembalikan relasi kuasa agar kelompok masyarakat marjinal diposisikan sebagai subjek utama pembangunan. Begitu pula John Friedmann (1992) yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah rekonfigurasi akses terhadap modal sosial, politik, dan ekonomi guna menolak marginalisasi. Dalam ranah domestik, Ginandjar Kartasasmita (1996) menekankan bahwa pemberdayaan mencakup tiga pilar utama: menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), serta melindungi masyarakat dari persaingan yang tidak seimbang (*protecting*).

Salah satu strategi operasional yang krusial dalam mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir adalah melalui pengembangan Unit Pengelolaan Ikan (UPI). UPI berfungsi sebagai fasilitas penanganan dan pengolahan hasil perikanan guna meningkatkan mutu, standar kebersihan, daya simpan, serta nilai tambah produk kelautan (Soeprodjo et al., 2020; Lomboan et al., 2021). Kehadiran UPI di wilayah pesisir diharapkan tidak hanya menjadi sarana industrialisasi fisik, melainkan mampu menjadi wahana inkubasi untuk mentransfer keterampilan teknis, membuka lapangan kerja, dan memperluas keterlibatan masyarakat pesisir dalam rantai pasok industri perikanan. Namun demikian, keberadaan investasi fasilitas pengolahan ikan oleh korporasi tidak secara otomatis menghasilkan pemberdayaan yang sejati. Tanpa skema kemitraan yang inklusif, masyarakat lokal berisiko hanya diposisikan sebagai buruh berupah rendah atau pemasok bahan baku tanpa memiliki partisipasi strategis dan kontrol ekonomi (Tuju et al., 2021; Lubys et al., 2021).

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu sentra perikanan tangkap utama di kawasan timur Indonesia dengan volume produksi mencapai ratusan ribu ton per tahun. Meskipun demikian, distribusi manfaat ekonomi belum terjangkau secara merata ke seluruh wilayah kepulauan perbatasan, seperti Kabupaten Kepulauan Talaud. Desa Taturan yang terletak di Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, merupakan kawasan pesisir perbatasan yang mayoritas warganya menggantungkan hidup pada sektor kelautan. Keterbatasan sarana pendingin, pengolahan, dan jaringan transportasi pemasaran selama ini menjadi penghambat utama peningkatan pendapatan nelayan Taturan. Berdirinya Unit Pengelolaan Ikan (UPI) yang dikelola oleh PT Berkat Mina Bahari di Desa Taturan membawa dinamika baru dalam struktur ekonomi lokal melalui kegiatan pembekuan dan penampungan ikan hasil tangkapan nelayan.

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat urgensi dan celah penelitian untuk mengkaji secara kritis apakah keberadaan UPI PT Berkat Mina Bahari di Desa Taturan telah benar-benar menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat pesisir yang substansial, ataukah sekadar menjalankan fungsi akuisisi bahan baku industri belaka. Dengan mengacu pada empat pilar pemberdayaan Jim Ife (2016) peningkatan kapasitas, akses terhadap sumber daya dan pasar, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta penguatan kontrol ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi secara mendalam derajat pemberdayaan masyarakat pesisir Desa Taturan melalui keberadaan UPI PT Berkat Mina Bahari.



2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi, memahami, dan menginterpretasikan secara mendalam makna serta dinamika sosial-ekonomi yang dialami masyarakat pesisir dalam konteks pelaksanaan kegiatan pemberdayaan secara alamiah (Creswell & Creswell, 2018). Tipe studi kasus digunakan untuk menelaah secara intensif dan terperinci fenomena pemberdayaan masyarakat pada ruang lingkup yang spesifik, yaitu di Unit Pengelolaan Ikan (UPI) PT Berkat Mina Bahari (Yin, 2018). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Taturan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Desa Taturan merupakan kawasan pesisir kepulauan perbatasan yang memiliki fasilitas pengolahan ikan berskala industri menengah-besar yang bermitra langsung dengan komunitas nelayan lokal.

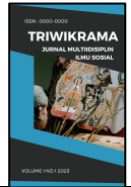
Fokus penelitian diorientasikan pada empat dimensi teoritis pemberdayaan masyarakat mengacu pada kerangka konseptual Jim Ife (2016), yaitu: (1) Peningkatan kapasitas (*capacity building*) masyarakat dan pekerja lokal; (2) Akses terhadap sumber daya, peralatan, serta jaringan pasar; (3) Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan strategis; dan (4) Penguatan kontrol ekonomi masyarakat atas rantai nilai perikanan. Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan informan kunci yang dipilih secara *purposive*, yang meliputi Kepala UPI PT Berkat Mina Bahari Taturan, Kepala Desa Taturan, dan perwakilan nelayan/masyarakat Desa Taturan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, arsip desa, serta penelusuran literatur ilmiah relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi yang memadukan tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi partisipatif pasif di lokasi pengolahan ikan dan dermaga pendaratan, serta dokumentasi foto dan arsip administratif (Miles et al., 2019). Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang terdiri dari tiga tahapan utama: (1) Kondensasi data (*data condensation*), yaitu proses menyeleksi, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah transkrip wawancara dan catatan lapangan; (2) Penyajian data (*data display*), yaitu mengorganisasikan data ke dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks analisis yang terstruktur; serta (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*drawing and verifying conclusions*), yaitu merumuskan makna, pola keterhubungan, dan verifikasi keabsahan temuan secara kritis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Desa Taturan secara administratif terletak di kawasan Pulau Karakelang Utara, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Secara topografis, Desa Taturan berada di wilayah perbatasan utara Indonesia yang berhadapan langsung dengan perairan terbuka. Desa ini diapit oleh tiga perbukitan yakni Bukit Laenda, Bukit Andaputun, dan Bukit Masare serta memiliki kawasan teluk yang berfungsi sebagai pelabuhan alami yang terlindung dari terpaan ombak besar, khususnya pada gelombang musim angin utara. Mayoritas penduduk Desa Taturan menggantungkan mata pencaharian hidup pada aktivitas penangkapan ikan di laut serta pertanian skala kecil. Kehadiran PT Berkat Mina Bahari sebagai perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri pembekuan ikan (*fish freezing industry*) di Dusun 3 Desa Taturan menjadi entitas ekonomi formal utama yang menyerap komoditas perikanan dan menyediakan lapangan kerja lokal.



Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Untuk menganalisis tingkat pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Taturan melalui keberadaan UPI PT Berkat Mina Bahari, temuan penelitian diuraikan dan dibedah berdasarkan empat dimensi utama teori pemberdayaan Jim Ife (2016):

1. Dimensi Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*)

Peningkatan kapasitas merupakan pilar utama dalam pemberdayaan yang bertujuan mengembangkan potensi, keterampilan, serta pengetahuan individu dan kelompok agar mampu mandiri (Ife, 2016). Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan Kepala UPI, Kepala Desa, dan Nelayan, pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan nelayan di Desa Taturan berjalan secara praktis berbasis pengalaman langsung di lapangan (*learning by doing*). Pelatihan berfokus pada tahapan awal penerimaan ikan dari kapal, yaitu identifikasi jenis-jenis ikan pelagis/demersal serta klasifikasi gradasi ukuran (*grading*) ikan sesuai standar ekspor/pembekuan. Selain itu, pihak perusahaan menyalurkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, masker, dan sepatu *boots* guna menjaga standar sanitasi dan keselamatan kerja.

Meskipun aktivitas tersebut berhasil meningkatkan pemahaman teknis dasar masyarakat lokal mengenai kualitas ikan, akumulasi kapasitas tersebut mengalami stagnasi pada ranah operasional parsial. Tidak ditemukan program pelatihan terstruktur mengenai manajemen keuangan usaha, teknologi pengolahan tingkat lanjut (*value-added processing*), maupun strategi pemasaran mandiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Fauziah et al. (2024), pemberdayaan melalui pendidikan (*better education*) seharusnya bersifat holistik dan membekali masyarakat dengan kemampuan manajerial agar tercipta kemandirian usaha yang nyata.

2. Dimensi Akses Terhadap Sumber Daya dan Pasar (*Access to Resources and Markets*)

Aksesibilitas terhadap modal, sarana produksi, dan jaringan pemasaran merupakan faktor determinan yang menentukan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir (Satria, 2015; Yonvitner & Yuliana, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan UPI PT Berkat Mina Bahari memberikan dampak positif berupa keterbukaan akses pendaratan dan penjualan ikan. Nelayan Desa Taturan memperoleh kepastian penyerapan hasil tangkapan secara langsung di lokasi pabrik tanpa harus menanggung risiko pembusukan ikan akibat ketiadaan sarana es atau keterbatasan transportasi ke luar pulau. Pengangkutan ikan dari perahu pendaratan ke lokasi UPI dilakukan menggunakan sepeda motor dan armada lokal secara cepat sehingga efisiensi rantai dingin terjaga.

Namun demikian, struktur akses pasar yang terbentuk memiliki sifat dependensi monopsistis. Masyarakat dan nelayan Desa Taturan tidak memiliki pilihan saluran distribusi pemasaran lain, sehingga tergantung sepenuhnya pada kebijakan pembelian tunggal PT Berkat Mina Bahari. Dalam perspektif Ife (2016), keterbukaan akses yang memberdayakan seharusnya memberikan pilihan-pilihan yang fleksibel (*making choices*) bagi komunitas, bukan mengunci mereka pada satu pola ketergantungan baru.

3. Dimensi Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan (*Participation in Decision Making*)

Partisipasi merupakan inti dari keadilan sosial dan redistribusi kekuasaan dalam pemberdayaan masyarakat (Chambers, 1997; Friedmann, 1992). Temuan empiris di Desa Taturan memperlihatkan bahwa derajat partisipasi masyarakat lokal masih berada pada kriteria partisipasi semu. Masyarakat nelayan dan tenaga kerja lokal hanya dilibatkan secara aktif pada fase pelaksanaan kegiatan fisik operasional, seperti penangkapan, pengangkutan, penyortiran, dan penataan ikan di pembekuan. Sebaliknya, pada fase pengoperasian strategis, penentuan



harga beli ikan, penetapan kuota penerimaan, dan penyusunan regulasi kerja, peran masyarakat hampir tidak ada.

Mekanisme penyampaian aspirasi, saran, maupun komplain dari masyarakat nelayan kepada manajemen perusahaan masih bersifat informal dan tidak terstruktur. Ketiadaan wadah musyawarah multipihak secara periodik antara pemerintah desa, perwakilan nelayan, dan korporasi menyebabkan posisi tawar masyarakat menjadi lemah. Hal ini sejalan dengan temuan Tuju et al. (2021) dan Soeprodjo et al. (2020) bahwa lemahnya pengawasan dan koordinasi partisipatif dalam program pemberdayaan berpotensi menghambat terciptanya partisipasi masyarakat yang substantif.

4. Dimensi Penguatan Kontrol Ekonomi (*Gaining Economic Control*)

Penguatan kontrol ekonomi tercapai apabila masyarakat lokal memiliki kekuasaan dan otoritas untuk mengelola sumber daya serta mengendalikan aktivitas ekonomi yang memengaruhi pendapatan mereka (Ife, 2016). Hasil wawancara dan analisis data menunjukkan bahwa aktivitas pengolahan ikan di UPI PT Berkat Mina Bahari secara riil mampu menggerakkan roda perekonomian Desa Taturan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan harian masyarakat. Nilai ekonomi komoditas perikanan meningkat dibanding sekadar menjual ikan segar eceran.

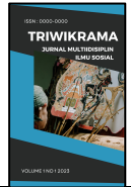
Meskipun terjadi peningkatan kesejahteraan finansial secara finansial (*better income*), kontrol ekonomi sepenuhnya masih dipegang oleh manajemen PT Berkat Mina Bahari. Masyarakat nelayan tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol atau menawar penetapan harga standar ikan, serta tidak memiliki saham atau kelembagaan ekonomi berbasis komunitas (seperti koperasi perikanan) yang mampu mengelola unit usaha mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang dirasakan belum dibarengi dengan kedaulatan ekonomi lokal.

Pembahasan

Temuan penelitian ini memperkuat proposisi teoritis Jim Ife (2016) bahwa intervensi pembangunan yang berpusat pada penanaman modal atau infrastruktur fisik sering kali melahirkan ketimpangan antara aspek peningkatan ekonomi dengan aspek kedaulatan komunitas. Keberadaan UPI PT Berkat Mina Bahari terbukti efektif bertindak sebagai penggerak ekonomi (*economic engine*) yang meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat pesisir Desa Taturan melalui penciptaan nilai tambah produk perikanan segar menjadi komoditas beku. Namun, apabila ditinjau dari taraf kemandirian berkelanjutan, proses pemberdayaan yang berlangsung baru mencapai level parsial.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Soeprodjo et al. (2020) mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Inobonto Dua, yang menemukan bahwa program bantuan fisik dan pelatihan teknis pemerintah kerap kali gagal melahirkan kemandirian apabila tidak diiringi dengan perubahan pola pikir (*mindset*) dan kelembagaan lokal. Begitu pula temuan Lomboan et al. (2021) di Desa Kumu Minahasa, yang menggarisbawahi bahwa aspek pendukung (*enabling*) dan kemampuan (*empowering*) harus disempurnakan dengan perlindungan (*protecting*) yang menjamin keadilan posisi tawar masyarakat lokal. Dalam kasus Desa Taturan, tidak tersedianya kelembagaan ekonomi lokal berbasis komunitas seperti Koperasi Nelayan atau Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menyebabkan daya tawar nelayan tetap berada pada posisi yang inferior di hadapan entitas korporasi.

Dalam tinjauan paradigma '*putting the last first*' (Chambers, 1997) dan rekonfigurasi aset sosial (Friedmann, 1992), model kemitraan perikanan di Desa Taturan memerlukan rekonstruksi mendasar. Keberadaan PT Berkat Mina Bahari seharusnya tidak menggeser peran nelayan menjadi sekadar pemasok pasif, melainkan mendorong pembentukan sinergi multipihak (pemerintah desa, swasta, dan masyarakat) yang menempatkan komunitas sebagai pemegang saham atau mitra sejajar. Hambatan eksternal berupa faktor cuaca buruk dan badai musim utara



yang sering menghentikan aktivitas melaut nelayan juga menuntut adanya strategi alih keterampilan (*reskilling*) di bidang pengolahan diversifikasi produk olahan perikanan skala rumah tangga agar pendapatan masyarakat tetap terjaga sepanjang tahun.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Unit Pengelolaan Ikan (UPI) PT Berkat Mina Bahari di Desa Taturan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengolahan ikan telah memberikan kontribusi positif dalam mendorong pergerakan ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Namun demikian, ditinjau dari kerangka teori pemberdayaan Jim Ife, proses pemberdayaan yang berlangsung belum mencapai taraf yang komprehensif dan optimal. Pada dimensi peningkatan kapasitas, transfer pengetahuan masih terbatas pada keterampilan teknis dasar operasional penyortiran ikan berbasis pengalaman praktis (*learning by doing*) tanpa menyentuh aspek manajerial dan pemasaran strategis. Pada dimensi akses sumber daya dan pasar, keberadaan UPI berhasil memberikan jaminan penyerapan hasil tangkapan nelayan, namun memicu kerentanan berupa ketergantungan monopsonistik pada satu mitra tunggal. Pada dimensi partisipasi, keterlibatan masyarakat masih berada pada tataran pelaksanaan teknis tanpa dilibatkan dalam formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan strategis. Sementara pada dimensi kontrol ekonomi, peningkatan kesejahteraan finansial belum dibarengi dengan kedaulatan ekonomi, karena kendali penetapan harga, rantai distribusi, dan regulasi usaha masih tersentralisasi pada pihak perusahaan.

Guna mengoptimalkan proses pemberdayaan masyarakat pesisir yang berkelanjutan di Desa Taturan, dirumuskan beberapa saran strategis. Pertama, pada dimensi peningkatan kapasitas, pemerintah daerah bersama pihak perusahaan perlu mengagendakan program pelatihan terstruktur yang mencakup manajemen keuangan usaha, diversifikasi olahan perikanan, serta kewirausahaan digital bagi masyarakat lokal. Kedua, pada dimensi akses pasar, perlu dikembangkan strategi diversifikasi jaringan pemasaran serta fasilitas pengolahan berbasis komunitas guna meningkatkan posisi tawar nelayan dan mengurangi ketergantungan monopsonistik. Ketiga, pada dimensi partisipasi, perlu dilembagakan wadah musyawarah multipihak secara periodik yang melibatkan Pemerintah Desa Taturan, perwakilan nelayan, dan manajemen PT Berkat Mina Bahari sebagai forum artikulasi aspirasi dan pengambilan keputusan bersama. Keempat, pada dimensi penguatan kontrol ekonomi, masyarakat disarankan untuk mendirikan kelembagaan ekonomi lokal mandiri berupa Koperasi Perikanan atau Kelompok Usaha Bersama (KUBE) guna mengelola rantai pasok perikanan secara kolektif sehingga masyarakat mampu bertransformasi menjadi aktor utama pembangunan ekonomi di wilayahnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fauziah, A., Heryadi, Y., & Pratama, R. (2024). *Konsep pemberdayaan masyarakat*. CV HEI Publishing Indonesia.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell.
- Ife, J. (2016). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice* (2nd ed.). Cambridge University Press.

*Corresponding author

E-mail addresses: reynaldimarinu19@gmail.com



- Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Cides.
- Lomboan, D. V. Y., Ruru, J., & Londa, V. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(109), 1-9.
- Lubys, M. A. A., Rares, J., & Plangiten, N. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberian Bantuan Bibit Cengkih Dan Bibit Ikan Air Tawar Di Desa Modayag Timur Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(105), 1-8.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Satria, A. (2015). *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soeprodjo, R. G., Ruru, J., & Londa, V. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Di Desa Inobonto Dua Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(89), 1-10.
- Tuju, F. V., Tulusan, F., & Palar, N. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Poopo Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(110), 1-9.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yonvitner, H. A. S., & Yuliana, E. (2016). Pengertian, potensi, dan karakteristik wilayah pesisir. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut*, 1-39.